

Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 - 2020 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Di Masa Pandemi Covid-19

Frillia Yuliet Ihalauw¹ Inggriani Elim¹ Peter M Kapojos

¹Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas SAM Ratulangi Manado

E-mail : frilliayuliet@gmail.com
e_inggriani@yahoo.com
pmkapojos@gmail.com

ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan yang berperan penting dalam upaya peningkatan kapasitas dan efektivitasnya. DPRD sebagaimana disyaratkan oleh Perda membahas dan menyetujui APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan menelaah dokumen atau rekening keuangan untuk mengumpulkan data guna penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai keadaan dan kondisi yang ada pada suatu hal tertentu. Berdasarkan hasil penelitian pendapatan daerah di atas, terdapat tiga sub rekening pendapatan daerah yang mengalami kenaikan dan penurunan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lain yang sah. Karena semua pengeluaran dikurangi dan terkonsentrasi pada penanganan COVID, peningkatan pengeluaran tak terduga QA 2020 cukup besar. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 akan menyebabkan perubahan kebijakan keuangan pemerintah daerah di tahun 2020, khususnya kebijakan pengelolaan keuangan antara pusat dan daerah yang mengalami beberapa transformasi terutama dalam rangka refocusing dan realokasi yaitu sentralisasi. Inilah sebabnya terdapat perbedaan analisis pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 dan 2020. Transfer kembali ke APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Kata Kunci : Analisis Akuntansi, Realisasi, Anggaran

ABSTRACT

The Regional Revenue and Expenditure Budget is a tool used by regional governments to implement policies that play an important role in efforts to increase their capacity and effectiveness. The DPRD as required by the Regional Regulation discusses and approves the APBD which is the regional government's annual financial plan. Descriptive research using qualitative methodology is the type of research used in this study. By examining documents or financial accounts to collect data for research, this study aims to identify various circumstances and conditions that exist in certain matters. Based on the results of the regional income research above, there are three sub-accounts of regional income that have increased and decreased, namely regional original income, transfer income, and other legitimate regional income. As all spending is reduced and concentrated on managing COVID, the QA 2020 unexpected spending increase is quite large. The Covid-19 pandemic in 2020 will lead to changes in local government financial policies in 2020, especially financial management policies between the central and regional governments which undergo several transformations, especially in the context of refocusing and reallocation, namely centralization. This is why there are differences in the analysis of regional income and expenditure in 2019 and 2020. Transfers back to the APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget).

Keywords : Accounting Analysis, Realization, Budget

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan suatu daerah sangat mempengaruhi masa depannya karena dapat menjadikan daerah tersebut kuat atau lemah, tergantung bagaimana mengelola dananya. Oleh karena itu, ketika mengejar pembangunan nasional, sangat penting untuk berkonsentrasi pada pertumbuhan ekonomi, yang membutuhkan anggaran untuk setiap waktu. Sumber daya dan pendapatan potensial suatu daerah dikumpulkan untuk membuat anggarannya. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan prakarsa atau program pemerintah yang menerima pungutan Anggaran Pendapatan Dan

Diterima: 11-01-2023; Disetujui untuk Publikasi: 18-01-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Belanja (APBD). DPRD sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Daerah membahas dan menyetujui APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Selain itu, APBD merupakan salah satu kekuatan di balik rehabilitasi dan pertumbuhan ekonomi lokal, yang akan membantu membangun masyarakat yang sukses, mandiri, dan adil. Selain itu, APBD berfungsi sebagai katalis dan faktor dalam mencapai tujuan makroekonomi daerah serta tujuan yang ditujukan untuk mengatasi berbagai tantangan dan masalah utama yang menghalangi pencapaian tujuan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Dalam rangka memberikan bimbingan dan arahan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD, maka pokok bahasan kebijakan tersebut adalah pedoman penyusunan APBD (PP No. 64 Tahun 2020).

Pandemi virus corona yang juga dikenal dengan COVID-19 berdampak pada perekonomian dan keuangan. Diprediksi pengaruh ini tidak hanya berlangsung pada tahun ini tetapi juga mungkin untuk beberapa tahun ke depan. Kondisi ini memaksa pemerintah Indonesia menempuh sejumlah opsi hukum berdasarkan langkah-langkah yang diambil untuk memerangi wabah Covid-19. Salah satunya dengan mengadopsi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam penanganan pandemi penyakit virus corona (Covid-19) tahun 2019 dan/atau ancaman terhadap perekonomian nasional. Keberadaan undang-undang ini berdampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan, baik secara substantif maupun prosedural. Salah satu contohnya adalah kebijakan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mengalami perubahan signifikan, terutama dalam konteks refocusing dan realokasi yaitu resentralisasi atau refocusing anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan dan transfer ke APBD.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari menargetkan pendapatan tahun 2020 berkurang berdasarkan data APBD. Akibat wabah yang memperlambat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Pusat harus merevisi proyeksi uang transfer dan pendapatan daerah yang menjadi penyebab turunnya. Di Kabupaten Manokwari, keadaan yang berbeda hadir karena pengeluaran APBD meningkat. Alokasi anggaran meningkat sebagai akibat dari peningkatan biaya tak terduga yang cukup besar dari realokasi dan refokus program dan kegiatan yang tidak diprioritaskan.

Akutansi

Menurut Supriyono (2018:2), akuntansi adalah disiplin ilmu atau pendekatan yang membantu pemangku kepentingan membuat keputusan dengan menyebarkan informasi yang relevan atau tepat waktu tentang kejadian suatu entitas atau organisasi. Sektor swasta, juga dikenal sebagai sektor swasta, dan sektor publik, juga dikenal sebagai sektor publik, adalah dua kategori di mana perusahaan atau organisasi dapat dibagi. Dengan kata lain, baik sektor publik maupun swasta menggunakan akuntansi. Menurut Hantonon dan Rahm (2018:2), akuntansi adalah pencatatan, klasifikasi, ringkasan dan pelaporan satuan moneter dari transaksi keuangan dan transaksi lain yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, serta interpretasi hasilnya. Karena membutuhkan ketelitian, akurasi, dan kebersihan, akuntansi disebut sebagai seni. Sumarsan (2017:1) mendefinisikan akuntansi sebagai seni mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mencatat transaksi dan kejadian keuangan untuk menghasilkan data keuangan atau laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kieso dan rekan. (2016: 2) Tiga kegiatan membentuk akuntansi. Aturan-aturan tersebut adalah: Aturan-aturan dasarnya adalah: Mengenali, mendokumentasikan, dan menginformasikan pihak-pihak yang berkepentingan atas kejadian-kejadian ekonomi sebagai sebuah organisasi. Bisnis mengidentifikasi kejadian ekonomi berdasarkan operasi mereka, dan kemudian mereka mendokumentasikan kejadian tersebut untuk menghasilkan catatan aktivitas keuangan. Pendekatan metodis digunakan untuk mencatat setiap peristiwa secara kronologis dan dalam satuan moneter. Terakhir, mendidik pihak yang berkepentingan tentang pengumpulan informasi dengan mendistribusikan laporan akuntansi, juga dikenal sebagai laporan keuangan.

Akutansi Sektor Publik

Akutansi sektor publik merupakan topik yang penting untuk didiskusikan di kalangan akademisi dan praktisi di sektor publik (Haryanto et al.2017: 1). Suatu rencana yang diberikan sebagai

rencana untuk memperoleh pendapatan dan pengeluaran dalam satuan moneter atau sebagai penyertaan langsung dalam anggaran sektor publik (Mardiasmo 2018:76). Akuntansi sektor publik digunakan untuk transparansi kepada publik agar dapat menegakkan hak-hak publik (Bahri 2021: 2).

Anggaran

Meurut Nur Afiah, dkk (2020:7) anggaran berfungsi sebagai peta jalan (*roadmap*) operasional pemerintah, yang menguraikan rencana penerimaan, belanja, transfer, dan keuangan, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah dan disusun secara sistematis untuk satu periode. Menurut Mardiasmo (2018:75), penganggaran adalah proses atau strategi penyusunan anggaran, sedangkan anggaran adalah hasil yang dinyatakan dalam metrik keuangan yang diharapkan dapat dicapai selama periode waktu tertentu.

Analisis Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah, menurut (Abdul Halim, 2018), didefinisikan sebagai semua pendapatan daerah yang menambah modal saham sepanjang tahun anggaran dan menjadi milik pemerintah provinsi serta tidak memerlukan penggantian dari pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2016), kinerja pendapatan daerah seringkali dianggap buruk jika kinerjanya kurang dari jumlah yang dianggarkan. Sangat penting untuk menerapkan anggaran yang melampaui target, seperti yang ditunjukkan oleh persentase pendapatan yang paling dominan, untuk meningkatkan kinerja pendapatan.

Analisis Belanja Daerah

Mahmudi (2016:158) mendefinisikan pertumbuhan sebagai kenaikan atau penurunan biaya selama periode tertentu. Analisis pertumbuhan dapat digunakan untuk memperkirakan pertumbuhan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan variabel lain selain biaya. Untuk memahami pertumbuhan belanja tahunan, ada baiknya menganalisis pertumbuhan belanja daerah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Hansen and Women (2019), laporan pertanggungjawaban adalah mekanisme yang mengukur berbagai pencapaian setiap pusat pelaporan berdasarkan berapa banyak informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pelaporan. Akun akuntabilitas Hansen dan Mowen (2019) mencakup empat komponen utama, yaitu mendefinisikan peran dan tanggung jawab, menetapkan standar kinerja, evaluasi kinerja, dan penghargaan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data

Berikut ini adalah dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yang mana terdiri dari :

1. Data kuantitatif adalah dalam Laporan Realisasi APBD Kabupaten Manokwari 2019–2020, data diberikan dalam bentuk angka. Perhitungan dan analisis rasio efektif pendapatan dan belanja daerah digunakan untuk mengkaji data yang akan digunakan dalam LRA mengenai pendapatan dan belanja daerah
2. Data kualitatif adalah informasi berbasis kata yang tidak dapat dihitung. Secara khusus, berupa penjelasan umum tentang topik penelitian.

Sumber data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Catatan LRA yang dikumpulkan dari kantor BPKAD Kabupaten Manokwari dijadikan sebagai data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang digunakan untuk mengetahui ringkasan APBD Kabupaten Manokwari T.A 2019-2020 pada masa pandemi covid-19 dengan menganalisis dan membandingkan data anggaran pendapatan dan belanja daerah antara tahun 2019 dan 2020 dengan memberikan kesimpulan ide-ide yang berasal dari temuan penelitian.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Struktur organisasi dibagi menjadi bagian-bagian atau pusat pertanggungjawaban dengan wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dengan menggunakan sistem akuntansi yang disebut laporan pertanggungjawaban. Setiap penyimpangan dari realisasi anggaran yang terjadi, apakah ada

surplus atau defisit anggaran, dikumpulkan dan dilaporkan dari masing-masing pusat yang bertanggung jawab. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 2019–2020 disajikan di bawah ini.

Tabel 1 Ringkasan LRA Pendapatan Dan Belanja Tahun 2019

Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5
Pendapatan	1.376.669.340.928, 50	1.368.906.301.423, 86	7.763.039.505	776,30%
Pendapatan Asli Daerah	102.053.492.440,10	108.554.356.172,86	(6.500.863.733)	650,09%
Pendapatan Transfer	1.082.773.086.488, 40	1.085.049.077.708, 00	2.275.991.219,60	227,60%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	191.842.762.000,00	175.302.867.543,00	(16.539.894.457,00)	165,40%
Belanja	1.289.373.988.000, 25	1.171.968.401.444, 27	(117.405.586.555,9 8)	117,41%
Belanja Operasi	969.199.342.597,26	888.202.831.830,27	(80.996.492.766,99)	809,94%
Belanja Modal	319.674.663.402,99	283.487.006.814,00	(36.187.656.588,99)	361,88%
Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	278.562.800,00	(221.437.200,00)	221,44%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Manokwari

Realisasi pendapatan dan realisasi belanja disajikan pada tabel di atas. Jumlah uang yang sebenarnya diterima adalah sebesar Rp1.368.906.301.423,86, lebih kecil dari jumlah anggaran yang dimaksudkan dari pajak daerah dan pendapatan resmi lainnya. Jumlah realisasi dari pajak daerah sebesar Rp108.554.356.172,86, dari transfer sebesar Rp1.085.049.077.708, dan dari sumber pendapatan lain yang sah sebesar Rp175.302.867.543. Jumlah pengeluaran yang sebenarnya adalah Rp. 1.171.968.401.444,27, melebihi jumlah yang dialokasikan. Biaya operasional, belanja modal, dan kontinjensi semuanya termasuk dalam anggaran. Biaya operasional berjumlah Rp. 888.202.831.830,27, beban modal Rp. 283.487.006.814,00, dan biaya tak terduga Rp. 278.562.800,00.

Tabel 2 Ringkasan LRA tahun 2020

Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5
Pendapatan	1.363.602.264.497, 03	1.321.403.070.385, 03	(42.199.194.112,02)	42,20%
Pendapatan Asli Daerah	83.389.821.626,68	84.605.179.537,03	1.215.357.910,35	121,53%
Pendapatan Transfer	875.279.389.209,35	985.759.566.053,00	110.480.176.843,65	110,49%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	404.933.053.661,00	251.038.324.795,00	(153.894.728.886,0 0)	153,89%

Belanja	1.205.969.322.235, 11	1.111.807.878.697, 66	(94.161.443.537,45)	941,61%
Belanja Operasi	903.233.714.273,11	872.023.811.112,66	(31.209.903.160,45)	312,10%
Belanja Modal	221.948.728.243,00	175.191.435.507,00	(46.757.292.736,00)	467,57%
Belanja Tak Terduga	80.786.879.719,00	64.592.632.078,00	(16.194.247.641,00)	161,94%

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Manokwari

Realisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran ditunjukkan pada tabel di atas. Jumlah uang yang direalisasikan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain yang sah adalah sebesar Rp. 1.321.403.073.855,03, kurang dari target anggaran. Rp 84.605.179.537,0 merupakan pendapatan asli daerah, Rp 985.759.566.053 merupakan pendapatan transfer, dan Rp 251.038.324.795,00 merupakan pendapatan daerah lainnya yang sah. Target penerimaan pemerintah daerah di Manokwari menurun pada 2020, menurut data APBD 2020. Akibat wabah yang memperlambat pertumbuhan ekonomi, pemerintah pusat harus melakukan modifikasi proyeksi pendapatan daerah serta transfer tunai. Jumlah pengeluaran yang sebenarnya adalah Rp. 1.111.807.878.697,66, yang kurang dari jumlah yang dibayangkan dalam anggaran. Biaya operasional, biaya modal, dan biaya tak terduga semuanya termasuk dalam anggaran pengeluaran. Beban usaha sebesar Rp872.023.811.112,66, beban modal sebesar Rp175.191.435.507, dan beban tak terduga sebesar Rp64.592.632.078 dalam realisasinya. Mengalokasikan dan mengarahkan kembali program dan kegiatan yang tidak diprioritaskan menyebabkan peningkatan belanja tak terduga yang menjadi penyebab pertumbuhan belanja. Penyisihan anggaran untuk biaya tak terduga akhirnya menjadi beban bagi pelaksanaan program pemulihan ekonomi.

Perhitungan dan Analisis Rasio Efektif Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Efektif Pendapatan Daerah

Efektivitas menunjukkan sejauh mana tujuan tertentu tercapai. Sebagaimana dikemukakan oleh Hidayat, “Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kualitas, kuantitas, dan waktu telah tercapai, dimana semakin besar proporsi target maka semakin tinggi efektivitasnya”.

Tabel 3 Kriteria Tingkat Efektif Penerimaan Pad

Kategori	Predikat
Sangat efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	< 60%

Sumber: (

Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996)

2. Efisien Belanja Daerah

Perbandingan antara pengeluaran aktual dan anggaran disebut rasio pengeluaran yang efisien. Pemerintah daerah dikatakan telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Sebaliknya jika lebih besar dari 100% maka terjadi pemborosan anggaran (Susanto, 2019).

Efisien belanja dapat diukur dengan Rumus:

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 4 Kriteria Tingkat Efisien Belanja Secara Umum

Kategori	Predikat
Sangat efektif	<60%
Efektif	60%-80%
Cukup efektif	80%-90%
Kurang efektif	90%-100%
Tidak efektif	>100%

Sumber: (Depdagri Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996)

Dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan tujuan penerimaan PAD, maka ditentukan rasio efektif pendapatan asli daerah (dianggarkan). Pendapatan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan tujuannya. Pendapatan Daerah Efektif Kabupaten Manokwari dihitung pada tabel di bawah ini.:

Tabel 5 Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kab. Manokwari 2019

Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5
Pendapatan	1.376.669.340.9	1.368.906.301.4	7.763.039.505	776,30
	28,50	23,86		%
Pendapatan Asli Daerah	102.053.492.440	108.554.356.172	(6.500.863.733)	650,09
	,10	,86		%
Pendapatan Transfer	1.082.773.086.4	1.085.049.077.7	2.275.991.219,6	227,60
	88,40	08,00	0	%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	191.842.762.000	175.302.867.543	(16.539.894.457	165,40
	,00	,00	,00)	%
Belanja	1.289.373.988.0	1.171.968.401.4	(117.405.586.55	117,41
	00,25	44,27	5,98)	%
Belanja Operasi	969.199.342.597	888.202.831.830	(80.996.492.766	809,94
	,26	,27	,99)	%
Belanja Modal	319.674.663.402	283.487.006.814	(36.187.656.588	361,88
	,99	,00	,99)	%
Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	278.562.800,00	(221.437.200,00	221,44
)	%

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Manokwari

a. Efektif Pendapatan Daerah

$$\text{Rasio Efektif} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektif} = \frac{1.368.906.301.423,86}{1.376.669.340.928,50} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektif} = 99,44\%$$

Realisasi anggaran lebih kecil dari target anggaran, sebagaimana terlihat dari perhitungan rasio pendapatan efektif di atas sehingga tingkat efektifitas tercapai sebesar 99,44%.

b. Efisien Belanja Daerah

$$\text{Rasio Efisien} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$1) \text{ Rasio Belanja} = \frac{1.171.968.401.444,27}{1.289.373.988.000,25} \times 100\% = 90,89\%$$

$$2) \text{ Rasio Operasi} = \frac{888.202.831.830,27}{969.199.324.597,26} \times 100\% = 91,64\%$$

$$3) \text{ Rasio Modal} = \frac{283.487.006.814,00}{319.674.663.402,99} \times 100\% = 88,68\%$$

$$4) \text{ Rasio Tak Terduga} = \frac{278.562.800,00}{500.000.000} \times 100\% = 55,71\%$$

Menurut perkiraan rasio efisien tersebut di atas, Kabupaten Manokwari menggunakan dana yang dianggarkan secara efisien, menggunakan 90,98% untuk biaya operasional, 91,64% untuk belanja modal, 88,68% untuk biaya tak terduga, dan 55,71% untuk biaya operasional. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Manokwari masih belum mampu merealisasikan belanja dengan sangat efektif pada tahun 2019.

Tabel 6 Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kab. Manokwari 2020

Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5
Pendapatan	1.363.602.264.497,03	1.321.403.070.385,03	(42.199.194.112,02)	42,20%
Pendapatan Asli Daerah	83.389.821.626,68	84.605.179.537,03	1.215.357.910,35	121,53%
Pendapatan Transfer	875.279.389.209,35	985.759.566.053,00	110.480.176.843,65	110,49%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	404.933.053.661,00	251.038.324.795,00	(153.894.728.886,00)	153,89%
Belanja	1.205.969.322.235,11	1.111.807.878.697,66	(94.161.443.537,45)	941,61%
Belanja Operasi	903.233.714.273,11	872.023.811.112,66	(31.209.903.160,45)	312,10%
Belanja Modal	221.948.728.243,00	175.191.435.507,00	(46.757.292.736,00)	467,57%
Belanja Tak Terduga	80.786.879.719,00	64.592.632.078,00	(16.194.247.641,00)	161,94%

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Manokwari

d. Efektif Pendapatan Daerah

$$\text{Rasio Efektif} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektif} = \frac{1.321.403.070.385,03}{1.363.602.264.497,03} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektif} = 96,91\%$$

Realisasi anggaran lebih kecil dari target anggaran sehingga tingkat efektifitas tercapai sebesar 96,91%, terlihat dari perhitungan rasio efektif pendapatan di atas.

e. Efisien Belanja Daerah

$$\text{Rasio Efisien} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$1) \text{ Rasio Belanja} = \frac{1.111.807.878.697,66}{1.205.969.322.235,11} \times 100\% = 90,89\%$$

$$2) \text{ Rasio Operasi} = \frac{872.023.811.112,66}{903.233.714.273,11} \times 100\% = 96,54\%$$

$$3) \text{ Rasio Modal} = \frac{175.191.435.507,00}{221.948.728.243,00} \times 100\% = 78,93\%$$

$$4) \text{ Rasio Tak Terduga} = \frac{64.592.632.078,00}{80.786.879.719,00} \times 100\% = 79,95\%$$

Menurut perkiraan rasio efisien tersebut di atas, Kabupaten Manokwari menggunakan anggaran belanjanya secara efisien pada 92,19% dari biaya operasionalnya, 96,54% dari biaya modalnya, dan 79,95% dari biaya tak terduganya. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Manokwari berjuang untuk merealisasikan belanja secara efisien pada tahun 2019 dan 2020. Perlu diketahui bahwa realisasi belanja lebih kecil dari anggaran pada penelitian Melinda (2019) yang mengarah pada perhitungan rasio efisiensi belanja pada QA 2017 Analisis Varians (Selisih) Belanja Daerah pada Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelola Kutai Kartanegara. Untuk menghindari adanya cacat atau tidak menguntungkan dalam perencanaan anggaran, adalah mungkin untuk mencapai jumlah pengeluaran paling sedikit dari anggaran, maka hipotesis yang disajikan sebelumnya terbantahkan.

4.2. Pembahasan

Realisasi Karena realisasinya jauh dari yang dianggarkan, kinerja pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari dari sisi penerimaan tahun 2019-2020 bisa dibilang kurang impresif. Pada tahun 2020 realisasinya meningkat menjadi Rp. 1.321.403.070385, dari Rp. 1.368.906.301.423 pada tahun 2019. Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manokwari tetap rendah setelah tiga tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manokwari masih kurang memberikan perhatian dalam pengendalian dan penelusuran sumber-sumber pendapatan asli daerah. Target penerimaan pemerintah daerah Manokwari tahun 2020 turun, menurut data APBD 2020. Akibat wabah yang menghambat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Pusat harus merevisi target uang transfer dan pendapatan daerah yang menjadi penyebab turunnya.

Realisasi pendapatan tambahan yang sah di Kabupaten Manokwari dapat dikatakan berhasil karena secara konsisten melebihi jumlah tahunan yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manokwari sangat berhasil memperoleh pendapatan alternatif dan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan daerah. Akibat peningkatan belanja tak terduga yang terjadi pada tahun 2020 sebesar 79,95% dengan mengalokasikan dan memfokuskan kembali program dan kegiatan yang tidak menjadi prioritas, maka realisasi kinerja belanja pemerintah Kabupaten Manokwari pada tahun 2019-2020 dilihat dari analisis rasio efektif pada umum dapat dikatakan tidak efisien.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Manokwari pada masa pandemi Covid-19 tahun 2019–2020. tahun fiskal:

1. Analisis realisasi penerimaan awal Kabupaten Manokwari turun sebesar Rp. 108.554.356.172,86 dan Rp. 84.605.179.537,03 antara 2019 dan 2020.
2. Riset realisasi pendapatan transfer daerah di Kabupaten Manokwari dari tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 735.464.155.776 pada tahun 2020 dan Rp. 631.287.798.119.00.
3. Pemeriksaan realisasi realisasi pendapatan daerah lainnya di Kabupaten Manokwari dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp. 175.302.867.543,00 pada tahun 2020 dan Rp. 251.038.324.795,00 pada tahun 2021.
4. Total realisasi belanja operasional berkurang dari tahun 2019 ke 2020, sebesar Rp. 890.174.751.830,27 dan Rp. 852.126.756.856,66 sesuai.
5. Pemeriksaan rasio efisiensi belanja daerah Kabupaten Manokwari menunjukkan bahwa realisasi belanja tidak mungkin dilaksanakan dengan sangat efisien pada tahun 2019 (90,89%) dan 2020 (92,19%).
6. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 akan mengakibatkan perubahan kebijakan keuangan pemerintah daerah, khususnya kebijakan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mengalami beberapa transformasi, terutama dalam rangka refocusing dan realocation yaitu resentralisasi dan transfer APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

5.2. Saran

Menindaklanjuti rekomendasi hasil kajian anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manokwari pada masa wabah Covid-19 tahun anggaran 2019–2020

1. Bagi Pemerintahan Kabupaten Manokwari

Berdasarkan analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2019–2020 pada masa pandemi Covid-19 dapat disimpulkan bahwa tidak stabil dan Pemerintah Kabupaten Manokwari masih melakukan pekerjaan yang buruk dalam memanfaatkan dan mengelola potensinya. Pemerintah Kabupaten Manokwari harus bekerja lebih keras untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Manokwari berperan cukup besar dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan sebagai daerah di negara berkembang. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Kabupaten Manokwari, rasio belanja modal yang saat ini masih rendah perlu ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Manokwari lebih mengutamakan belanja operasional daripada modal dalam mengalokasikan dana. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Manokwari perlu lebih memperhatikan belanja modal karena digunakan untuk aset tetap yang akan bermanfaat dalam jangka panjang dan mungkin memiliki manfaat di masa depan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya relevan bagi peneliti yang bekerja pada tahun 2019 dan 2020. Untuk menganalisis anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manokwari lebih akurat, penelitian tambahan diharapkan dapat menambah periode tahun penelitian. Selain itu, disarankan agar peneliti tambahan memperluas jangkauan penelitian dengan fokus pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari dan menambah daerah yang lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, W. (2018). Keterampilan Wirausaha Untuk Keberhasilan Usaha. *Journal Of Business Management Education*.
- Hantono, D. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Melinda. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kutai Negara. *Emba*.

Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Anggota Ikapi, Anggota Appti.